



**PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN SAHAM
PUBLIK, REGULASI PEMERINTAH DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

(Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018)

SKRIPSI

Oleh:

Adinda Restu Ramadhani

NPM 4316500006

Diajukan Kepada :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2020



**PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN SAHAM
PUBLIK, REGULASI PEMERINTAH, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

(Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018)

SKRIPSI

Oleh:

Adinda Restu Ramadhani

NPM 4316500006

Diajukan Kepada :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2020



**PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN SAHAM
PUBLIK, REGULASI PEMERINTAH, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

SKRIPSI

Oleh:

Adinda Restu Ramadhani

NPM 4316500006

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 30 Juni 2020

Dosen Pembimbing I

Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.
NIPY. 15661651980

Dosen Pembimbing II

Drs. Baihaqi Fanani, M.M. Akt
NIPY. 1576981964

Ketua Program Studi Akuntansi

Aminul Fajri, S.E., M.Si., Akt
NIPY. 1385231970

Pengesahan Skripsi

Nama : Adinda Restu Ramadhani

NPM : 4316500006

Judul : PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN SAHAM
PUBLIK, REGULASI PEMERINTAH DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2020

Ketua penguji



Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M.

NIPY. 15661651980

Penguji I



Yanti Puji Astutie, S.E, M.Si

NIPY. 197409142005012000

Penguji II



Aminul Fajri, S.E.,M.Si.,Akt

NIPY. 1385231970

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Aminul Fajri, S.E.,MSi.,Akt

NIPY 1385231970

MOTTO

“ Tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya. Buktikan, buktikan, buktikan, hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati. ”

(Adinda Restu Ramadani)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya di setiap langkah dan hembusan nafas sehingga bisa mengerjakan skripsi ini dari awal proses sampai karya ini selesai.
2. Kedua orang tuaku Bapak Dulatip dan Ibu Tri Sayekti Handayani yang senantiasa memberikan doa, semangat dan kebahagiaan yang tidak pernah terputus.
3. Sahabat saya Aeni Mahmudah, Amalia Shifa, Aulia Fitriani, dan Dwi Astika Cahya Hati yang selalu memberikan semangat tiada henti.
4. Teman dekat saya Syahrul Romadon yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, selalu ada setiap waktu untuk memberikan dukungan dan semangat.
5. Teman-teman akuntansi A 2016 yang selalu memberikan motivasi.
6. Almamaterku.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adinda Restu Ramadhani

NPM : 4316500006

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Konvergensi IFRS, Kepemilikan Saham Publik, Regulasi Pemerintah, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018)”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, memanipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Tegal, Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Adinda Restu Ramadhani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Konvergensi IFRS, Kepemilikan Saham Publik, Regulasi Pemerintah dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui pengaruh negatif dari Konvergensi IFRS terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). 2) Untuk mengetahui pengaruh negatif dari Kepemilikan Saham Publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). 3) Untuk mengetahui pengaruh negatif dari Regulasi Pemerintah terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). 4) Untuk mengetahui pengaruh positif dari Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Adapun teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian : 1). Hasil pengujian terhadap konvergensi IFRS memiliki nilai signifikansi $0,897 > 0,025$, ini berarti variabel konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. 2) Hasil pengujian terhadap kepemilikan saham publik memiliki nilai signifikansi $0,928 > 0,025$, ini berarti variabel kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. 3) Hasil pengujian terhadap regulasi pemerintah memiliki nilai signifikansi $0,873 > 0,025$, ini berarti variabel regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. 4) Hasil pengujian terhadap ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,025$. Nilai B ukuran perusahaan sebesar 0,103 menunjukkan pengaruh positif. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif variabel ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility*.

Kata kunci : konvergensi IFRS, kepemilikan saham publik, regulasi pemerintah, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility*.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of IFRS convergence, public share ownership, government regulation and company size on corporate social responsibility disclosure (empirical studies on food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2015-2018).

The purpose of this study is to find out: 1) To find out the negative influence of IFRS Convergence on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). 2) To find out the negative influence of Public Share Ownership on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). 3) To find out the negative effects of Government Regulations on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). 4) To find out the positive influence of Company Size on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR).

The population in this study were all sub-food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. The sampling technique used was the purposive sampling method. The analysis used is multiple linear regression analysis method.

Research results: 1). The test results of IFRS convergence have a significance value of $0.897 > 0.025$, this means the IFRS convergence variable has no effect on corporate social responsibility. 2) The results of testing the ownership of public shares have a significance value of $0.928 > 0.025$, this means the variable public ownership does not affect corporate social responsibility. 3) The results of testing of government regulations have a significance value of $0.873 > 0.025$, this means that government regulation variables do not affect corporate social responsibility. 4) The results of testing the size of the company has a significance value of $0.001 < 0.025$. Value of firm size B of 0.103 indicates a positive effect. Therefore, it can be concluded that there is a positive influence on company size variables on corporate social responsibility.

Keywords: IFRS convergence, public share ownership, government regulations, company size and corporate social responsibility.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal penelitian untuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Konvergensi IFRS, Kepemilikan Saham Publik, Regulasi Pemerintah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”**.

Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Akt, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Aminul Fajri, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M, _selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Drs. Baihaqi Fanani, M.M. Akt, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.

Kami menyadari proposal penelitian untuk skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'AR'.

Adinda Restu Ramadhani

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori <i>Stakeholder</i>	10
2. <i>Corporate Social Responsibility</i>	11
3. Konvergensi IFRS	15
4. Kepemilikan Saham Publik.....	19
5. Regulasi Pemerintah.....	20
6. Ukuran Perusahaan.....	22
B. Studi Penelitian Terdahulu	25

C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Perumusan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel.....	38
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	40
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	47
1. Uji Statistik Deskriptif.....	47
2. Uji Asumsi Klasik	47
a. Uji Normalitas	47
b. Uji Multikolonieritas	48
c. Uji Autokorelasi	49
d. Uji Heteroskedastisitas	50
3. Uji Hipotesis.....	50
a. Analisis Linier Berganda.....	50
b. Uji Parsial (Uji t)	51
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
F. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	54
1. Sejarah perkembangan Bursa Efek Indonesia	54
2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia.....	55

3. Struktur organisasi Bursa Efek Indonesia	56
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Uji Statistik Deskriptif.....	57
2. Uji Asumsi Klasik	61
a. Uji Normalitas	61
b. Uji Multikolonieritas	62
c. Uji Autokorelasi	63
d. Uji Heteroskedatisitas	64
3. Uji Hipotesis	66
a. Analisis Linier Berganda.....	66
b. Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	67
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
C. Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
C. Keterbatasan	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan	39
Tabel 3.3 Definisi Operasional Dan Variabel	44
Tabel 3.4 Autokorelasi	49
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	62
Hasil 4.3 Uji Multikolonieritas	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	64
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Parsial.....	68
Tabel 4.7 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini berada dalam transisi dari perekonomian yang berbasis agraris menjadi perekonomian semi-industri. Penyebab transisi karena peningkatan pada perusahaan manufaktur. Dibuktikan pada pertumbuhan perusahaan di sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,49%. Pertumbuhan di atas dibarengi dengan tingginya tingkat produksi perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang berdampak pada lingkungan karena adanya limbah yang dihasilkan. Perusahaan perlu melaporkan kebijakan yang diambil dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan adanya kegiatan operasional perusahaan untuk memperoleh *profit*. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan *corporate social responsibility* (Ayem & Rohana, 2019).

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Indika, 2015). CSR mampu meningkatkan citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tata kelola bisnisnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka pemerintah dan masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan tersebut untuk beroperasi di wilayah mereka (Agung, 2015).

Indonesia mulai mengemukakan wacana mengenai *corporate social responsibility* di tahun 2001, sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Penyebabnya belum mempunyai sarana pendukung seperti standar pelaporan dan tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun auditornya). Pada tanggal 23 september 2007, pengungkapan CSR mulai diwajibkan melalui UU mengenai Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam (Nasir, *et al.*, 2013).

Perusahaan swasta telah banyak mengembangkan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR). Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan. Tuntutan ini muncul akibat perkembangan eksistensi secara berkelanjutan. Keberlanjutan nilai perusahaan diharapkan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan untuk jangka panjang. Praktik pengungkapan CSR memegang peranan yang penting untuk perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan tidak jarang aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan (Indraswari & Astika, 2015).

Perlu dibedakan antara program *corporate social responsibility* dengan kegiatan *charity*. Kegiatan *charity* hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik

terhadap perusahaan. Sementara, program *corporate social responsibility* merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik (Lamia, Zirman, & Anisma, 2014).

Permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia terjadi karena lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya tentang aturan ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan dan perimbangan bagi hasil suatu industri dalam era otonomi daerah. Karena masih lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung jawab sosial tersebut, akibatnya yang terjadi di dalam praktek perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya (Rahayu & Anisyukurlillah, 2015).

Fenomena yang terjadi di Indonesia banyak perusahaan mengabaikan kegiatan tanggung jawab sosial. Salah satunya dalam industri rokok, yang pertama dan utama merupakan tanggung jawab terhadap efek rokok pada kesehatan manusia, baik perokok maupun orang-orang di sekitarnya. Alih-alih bertanggung jawab, industri rokok cenderung membantah efek rokok terhadap kesehatan. Mustahil kita bisa menyaksikan ada perusahaan rokok yang menyantuni perokok yang sakit akibat merokok. Industri rokok juga tutup mata terhadap perokok di bawah umur. Alih-alih melakukan usaha mencegah anak-anak remaja merokok, industri rokok justru menjadikan mereka sebagai target pemasaran (Abdurakhman, 2018).

Contoh lain dari fenomena di atas yaitu tuduhan pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya dan kasus PT Freeport Indonesia

yang pada akhirnya menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup mempublikasikan temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia. Dari hasil pemantauan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia dinilai tidak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut, tentu saja hal tersebut termasuk dalam pencemaran lingkungan. Maka dari itu pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang *corporate social responsibility* yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Nurfadilah & Sagara, 2015).

Beberapa faktor dapat meningkatkan pengungkapan CSR sebagai bentuk perluasan pengungkapan laporan keuangan perusahaan, faktor yang pertama adalah konvergensi IFRS. Konvergensi IFRS juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyesuaikan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan keduanya (Gunawan & Hendrawati, 2016).

Di Indonesia telah menerapkan konvergensi IFRS untuk mengatur pelaporan keuangan yang bersifat *mandatory*. Untuk memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan, perusahaan perlu menyeimbangkan pengungkapan *mandatory* dan *voluntary*. Dalam keadaan tertentu perusahaan ingin meningkatkan kredibilitas *mandatory disclosure* dengan menyediakan kerja sama *voluntary disclosure*. *Mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* akan saling melengkapi. Adanya keseimbangan pengungkapan tersebut investor akan memberikan penilaian yang positif

karena adanya transparansi kepatuhan terhadap standar akuntansi yang diberlakukan serta memiliki kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan (Ayem & Rohana, 2019).

Faktor yang kedua yaitu kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham di bawah 5% (<5%) yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan (Aini, 2015).

Faktor yang ketiga yaitu regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah dapat dimengerti sebagai bagian yang tidak dapat di pisahkan dari lingkungan perusahaan, sebagai badan pembuat peraturan (*regulatori body*) pemerintah memiliki peran signifikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan kepada lingkungan eksternalnya. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 40 Tahun 2007 mengisyaratkan secara eksplisit peran yang dilakukan pemerintah adalah peran *mandating*. Peran pemerintah menjadi penting karena pemerintah juga merupakan bagian dari komponen *stakeholder* perusahaan (Basuki & Patrioty, 2009).

Faktor yang keempat yaitu ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan adalah skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu

perusahaan. Secara umum, sebuah perusahaan besar tidak terlepas dari tekanan politis yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial sehingga akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil (Sriayu & Mimba, 2013).

Terdapat hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Rohana (2019) yang membuktikan variabel konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Penelitian Indraswari & Astika (2015) membuktikan bahwa variabel kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility* dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Penelitian Nurfadilah & Sagara (2015) membuktikan variabel regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Penelitian Aini (2015) membuktikan bahwa variabel kepemilikan saham publik tidak berpengaruh pada *corporate social responsibility*. Penelitian Rahayu & Anisyukurlillah (2015) membuktikan bahwa variabel kepemilikan saham publik berpengaruh positif pada *corporate social responsibility*.

Penelitian Putri, Zulbahridar, & Kurnia (2017) juga membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Penelitian Putra & Prastiwi (2012) membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial, sedangkan variabel kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial. Penelitian Wijaya (2012) membuktikan bahwa

variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial. Penelitian Lamia, Zirman & Anisma (2014) membuktikan bahwa variabel Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Dan penelitian Nopando & Susanti (2017) membuktikan bahwa variabel regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian mengambil judul “PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, REGULASI PEMERINTAH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2015-2018).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
2. Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
3. Apakah Regulasi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif dari Konvergensi IFRS terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Untuk mengetahui pengaruh negatif dari Kepemilikan Saham Publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
3. Untuk mengetahui pengaruh negatif dari Regulasi Pemerintah terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif dari Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagian CSR perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pelaporan dan pengungkapan CSR.
- b. Pemerintah, sebagai suatu bahan pertimbangan untuk merumuskan suatu kebijakan perihal pengungkapan CSR perusahaan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.
- c. Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai pengungkapan CSR perusahaan.
- d. Investor, sebagai sarana informasi mengenai kinerja perusahaan baik dari segi keuangan maupun keterkaitannya dengan sosial dan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* pertama kali di populerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam buku manajemen strategisnya yang berjudul Pendekatan *Stakeholder* 1984. Freeman mendefinisikan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai “kelompok atau individu yang dapat mendampaki atau didampaki oleh pencapaian tujuan organisasi” (Banjarnahor, 2017).

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, terutama yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan (Ayem & Rohana, 2019).

Menurut Aini (2015) pendekatan *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu, yaitu perubahan lingkungan. *corporate social responsibility* merupakan strategi

perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemangku kepentingan, semakin baik pengungkapan *corporate social responsibility* maka pemangku kepentingan akan semakin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan mencapai laba.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan memperhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun tanggung jawab secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham. Hal ini berarti, perusahaan dan stakeholder membentuk hubungan yang saling mempengaruhi.

2. *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rudito & Famiola (2019:1) tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih populer dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*). CSR tentunya sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh

budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif.

Ruang lingkup CSR sendiri yang dikembangkan oleh WBCSD (*World Business Council for Sustainable Development*) pada awalnya adalah keluarga para pekerja di dalam lingkaran korporat terlebih dahulu kemudian ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Fokus aktivitas kepada kegiatan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Definisi dan konsep inilah kemudian yang banyak dianut dan menjadi dasar oleh banyak korporat dan para akademisi, baik akademisi manajemen dan *social science* sampai sekarang (Rudito & Famiola, 2019:12).

Menurut Rudito & Famiola (2019:133) kegiatan program yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks CSR dapat dikategorikan dalam tiga bentuk :

a. Public relations

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan dengan perusahaan pembuat suatu kegiatan sosial tertentu dan khusus sehingga tertanam dalam image

masyarakat bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan sosial.

b. Strategi definsif

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna menangkis anggapan negatif masyarakat luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas atau masyarakat yang sudah terlanjur berkembang.

c. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan itu.

Melakukan program untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara materil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas.

Di luar kewajiban untuk menaati peraturan, *corporate social responsibility* memang sepatutnya dilaksanakan oleh suatu perusahaan, dengan kesadaran dan bersifat sukarela, karena *corporate social responsibility* saat ini telah menjadi *social license to operation* bagi perusahaan, yang sebenarnya dapat dijabarkan dari perumusan misi perusahaan. Makna *corporate social responsibility* semakin meluas, bukan sekedar tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar

tetapi meluas keseluruh planet bumi dan harus dikelola dengan sasaran yang jelas dan perencanaan yang baik (Susanto, 2017).

Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang (Susanto, 2017).

Menurut Susanto (2017) pada sisi perusahaan besar terdapat berbagai manfaat yang diperoleh dari aktivitas *corporate social responsibility*, antara lain :

- a. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
- b. *Corporate social responsibility* bisa berfungsi sebagai pelindung maupun membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
- c. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- d. *Corporate social responsibility* yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*.
- e. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan. Misalnya menjaga lingkungan sekitar perusahaan, memberi bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan membangun fasilitas umum.

Dalam penelitian ini tingkat pengungkapan CSR diukur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Saat ini standar GRI versi terbaru adalah versi G4. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Dalam standar GRI-G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Total indikator yang terdapat dalam GRI-G4 mencapai 91 item (Alawiah, 2017).

3. Konvergensi IFRS

PSAK terkini sesuai program konvergensi IFRS, merupakan PSAK terbaru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) efektif per 1 Januari 2020 merupakan wujud nyata DSAK IAI dalam memenuhi komitmen konvergensi IFRS. SAK efektif per 1 Januari 2020 telah merilis tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru. Ketiga PSAK itu memiliki poin

masing-masing, yaitu PSAK 71 mengatur mengenai instrumen keuangan, PSAK 72 mengatur mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK 73 mengatur mengenai sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Menurut Martani, *et al.* (2016:16) IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama sebagai berikut :

a. *Principles-Based*

Standar yang menggunakan *Principles-Based* hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar, sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian.

b. Nilai wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (*historical cost*). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan *historical cost*. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud dan dibuka opsi

penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehannya diyakini lebih *reliable*.

c. Pengungkapan

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.

Menurut Kartikahadi, *et al.* (2016:27) permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. Ketidakstabilan nilai rupiah

Sehubungan dengan nilai rupiah yang cenderung lemah di pasar valuta asing dan sering kali tidak stabil, maka perubahan IAS 21 *the effects of changes in foreign exchange rates* mendekati FABS akan mempunyai dampak serius dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sarat *exposure* valuta asing, terutama bila terjadi devaluasi atau depresiasi rupiah secara serius, seperti kejadian di tahun 1978, 1983, 1986 dan 1997.

b. Landasan hukum yang berbeda

Aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara sering kali merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam mengadopsi suatu standar akuntansi. Misalnya dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan, dalam definisi SAK termasuk peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.

c. Profesi penunjang lain yang belum berkembang

Pengaplikasian beberapa standar akuntansi memerlukan dukungan dari profesi penunjang lain (penilai dan aktuaris) yang setaraf dengan Negara maju.

d. Frekuensi perubahan IFRS

IASB relatif sering melakukan revisi atas standar yang dikeluarkannya. Setiap standar akuntansi perlu dipahami secara jelas sebelum diterapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konvergensi IFRS adalah standar yang dibuat dengan tujuan memberikan kumpulan standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Adanya konvergensi IFRS mempengaruhi tekanan dari para pemangku kepentingan untuk memperluas pengungkapan laporan keuangan tahunan.

Penerapan konvergensi IFRS pada penelitian ini ditentukan ada atau tidaknya dampak signifikan timbul atas penerapan konvergensi IFRS di suatu perusahaan. Konvergensi IFRS diukur dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan perusahaan dalam kategori DART *deloitte accounting research tool other checklists information*.

4. Kepemilikan Saham Publik

Konsentrasi kepemilikan saham publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Untuk meningkatkan nilai perusahaan maka diperlukan pendanaan yang diperoleh melalui pendanaan saham masyarakat (publik). Perusahaan dengan kepemilikan saham publik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dianggap dapat beroperasi dan memberikan deviden yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas (Rahayu & Anisyukurlillah, 2015).

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan mencatatkan saham, dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian diserahkan kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang

ditawarkan, maka perlu dilakukan penjabatan. Distribusi akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (Bursa Efek Indonesia, 2017).

Jadi dapat disimpulkan kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Kepemilikan saham publik dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Besarnya saham publik/masyarakat diukur melalui rasio antara jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap total saham perusahaan di Indonesia (Rahayu & Anisyukurlillah, 2015).

5. Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah merupakan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perusahaan. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan asing. Beberapa peraturan terkait isu utama CSR di Indonesia yaitu: *Organisational governance, Environment, Labour practices, Consumer issues, Fair operating practices, Human rights, Social and economic development*. Semakin banyak peraturan yang harus diataati oleh perusahaan maka semakin

luas pula pengungkapan yang harus dilakukan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut (Situmorang, 2017).

Menurut Rudito & Famiola (2019:15) di lain sisi, pihak pemerintah, pemahaman tanggung jawab sosial masih banyak yang tidak sama. Antara satu kementerian dan kementerian yang lain sehingga menimbulkan banyak interpretasi yang tidak jelas. Pemerintah daerah sendiri hanya melihat tanggung jawab sosial sebagai cara untuk mendapatkan dana tambahan di luar pajak. Yang terjadi kemudian banyak penyalahgunaan anggaran dana tanggung jawab sosial untuk tujuan politik, dan tidak tepat sasaran. Tidak sesuai dengan tujuan sesungguhnya yaitu untuk mensejahterakan dan bertanggung jawab terhadap dampak dari operasionalnya. Dalam konteks ini, pemerintah belum menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengawas yang baik untuk menentukan suatu program berjalan dengan baik atau benar.

Menurut Rudito & Famiola (2019:15-16), beberapa permasalahan yang dapat dicatat antara lain :

- a. Aturan tanggung jawab sosial di masing-masing kementerian berbeda. Misalnya aturan tanggung jawab sosial di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, juga dalam lembaga SKK Minyak dan Gas sehingga menimbulkan kerancuan dalam menentukan prioritas.

- b. Terjadinya timpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekitar korporat antara korporat dengan pemerintah daerah. Pemda banyak membuat peraturan daerah yang kemudian memberatkan dunia usaha. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan bekerja sama dengan pihak korporat.
- c. Monitoring yang kurang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian) dan pemerintah daerah.

Jadi dapat disimpulkan regulasi pemerintah adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan dengan aturan tertentu. Regulasi pemerintah ini banyak digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan. Pemerintah memiliki peran signifikan terhadap kebijakan yang dibuat perusahaan kepada lingkungan eksternalnya.

Regulasi pemerintah dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel regulasi pemerintah diukur dengan menggunakan *log* natural beban pajak (Nopando & Susanti, 2017).

6. Ukuran Perusahaan

Menurut Herry (2017:12) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan *total asset* maupun total penjualan bersih, semakin besar *total asset* maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar *asset* maka semakin besar modal yang ditanam,

sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Ukuran perusahaan melalui *total asset* cenderung lebih stabil daripada melalui penjualan, hal ini disebabkan karena penjualan cenderung lebih berfluktuasi setiap tahun daripada *total asset*.

Perusahaan besar lebih banyak menarik perhatian dari masyarakat, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan besar memiliki biaya yang lebih besar daripada perusahaan kecil, oleh karena itu perusahaan besar akan cenderung mengungkapkan informasinya lebih banyak sebagai langkah untuk mengurangi biaya tersebut (Agung, 2015). Secara umum, sebuah perusahaan besar tidak terlepas dari tekanan politis yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial sehingga akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan lebih luas (Sriayu & Mimba, 2013).

Menurut Herry (2017:97) badan standarisasi nasional ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) :

a. Perusahaan besar

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000.

b. Perusahaan menengah

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.

c. Perusahaan kecil

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.

Jadi dapat disimpulkan ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan.

Variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan *log* natural *total asset*, tujuannya agar mengurangi perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dan ukuran perusahaan kecil sehingga data *total asset* dapat terdistribusi normal (Putri, Zulbahridar, & Kurnia, 2014).

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *corporate social responsibility* telah banyak dilakukan tetapi hasilnya masih belum konsisten. Termasuk penelitian menghubungkan Konvergensi IFRS, Kepemilikan Saham Publik, Regulasi Pemerintah, dan Ukuran Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility*, yang hasilnya masih berbeda-beda. Berikut adalah uraian dari penelitian terdahulu mengenai *Corporate Social Responsibility* :

Ayem & Rohana (2019) melakukan penelitian mengenai konvergensi IFRS dan profitabilitas terhadap *corporate social responsibility*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan konvergensi IFRS tidak berpengaruh, Sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Indraswari & Astika (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap CSR.

Nurfadilah & Sagara (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan *corporate social*

responsibility. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah secara simultan berpengaruh pada *corporate social responsibility*.

Aini (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh. Sedangkan kepemilikan saham publik, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada *corporate social responsibility*.

Rahayu & Anisyukurlillah (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan saham publik, profitabilitas dan media terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif. Sedangkan variabel profitabilitas dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Putri, Zulfahridar, & Kurnia (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan basis kepemilikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2014. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan basis kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Putra & Prastiwi (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan *leverage*, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Wijaya (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan ukuran dewan komisaris, *leverage*, profitabilitas dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Lamia, Zirman & Anisma (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, porsi kepemilikan saham publik dan

ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan *food & beverages* yang listing di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, *leverage*, porsi kepemilikan saham publik dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Nopando & Susanti (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh regulasi pemerintah, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional berpengaruh positif, sedangkan regulasi pemerintah dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Konvergensi IFRS dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Ayem & Rohana (2019).	Hasil penelitian ini menunjukkan konvergensi IFRS tidak berpengaruh, sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
2.	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham	Indraswari & Astika	Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
	Publik terhadap Pengungkapan CSR.	(2015).	dan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif pada CSR.
3.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Nurfadhila h & Sagara (2015).	Hasil penelitian <i>good corporate governance</i> , karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah secara simultan berpengaruh pada <i>corporate social responsibility</i> .
4.	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI).	Aini (2015).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh. Sedangkan kepemilikan saham publik, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada <i>corporate social responsibility</i> .
5.	Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas dan Media terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.	Rahayu & Anisyukurillah (2015).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif. Sedangkan variabel profitabilitas dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial.
6.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Basis Kepemilikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2012-2014.	Putri, Zulbahridar & Kurnia (2014).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas dan basis kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> .

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
7.	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Putra & Prastiwi (2012).	Hasil penelitian menunjukkan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sedangkan <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Sosial.
8.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Wijaya (2012).	Hasil penelitian ini menunjukkan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sedangkan Ukuran Dewan Komisaris, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.
9.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Porsi Kepemilikan Saham Publik Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Laporan Tahunan Perusahaan <i>Food & Beverages</i> Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia.	Lamia, Zirman & Anisma (2014).	Hasil penelitian ini menunjukkan Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Porsi Kepemilikan Saham Publik Dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
10.	Pengaruh Regulasi Pemerintah, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan CSR.	Nopando & Susanti (2017).	Hasil penelitian ini menunjukkan Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional berpengaruh positif, sedangkan Regulasi Pemerintah dan Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana tentang pengaruh yang menghubungkan variabel-variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengetahui hubungan antar kedua variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Konvergensi IFRS, Kepemilikan Saham Publik, Regulasi Pemerintah dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*.

1. Pengaruh konvergensi IFRS terhadap *Corporate Social Responsibility*

PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS, merupakan PSAK terbaru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Adanya konvergensi IFRS mempengaruhi tekanan dari para pemangku kepentingan untuk memperluas pengungkapan laporan keuangan tahunan, sehingga dengan adanya tekanan tersebut, dapat meningkatkan

pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk perluasan pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Ayem & Rohana, 2019).

Penelitian Smith, *et al.* (2014) menemukan bahwa dengan adanya konvergensi IFRS menunjukkan peningkatan *Corporate Social Disclosure* yang dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan. Hal ini berbeda dengan penelitian Ledoux & Cormier (2011) yang menemukan bahwa dengan peningkatan standar akuntansi melalui konvergensi IFRS maka *voluntary disclosure* semakin rendah.

2. Pengaruh kepemilikan saham publik terhadap *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan saham publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak masyarakat yang dihitung dalam persentase (Rahayu & Anisyukurlillah, 2015). Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan (*deviden*) yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*) sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas. Perusahaan dengan porsi kepemilikan publik lebih luas akan cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat (Badjuri, 2011).

Persentase kepemilikan saham menentukan struktur kepemilikan di perusahaan. Kepemilikan saham publik memperlihatkan porsi saham yang dimiliki oleh publik. Semakin besar kepemilikan saham publik maka semakin tinggi kepentingan publik yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Hal ini membuat pelaporan CSR menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan yang kepemilikan saham publiknya tinggi (Lamia, Zirman & Anisma, 2014). Semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas termasuk pengungkapan CSR (Sriayu & Mimba, 2013).

Handriani (2011) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sriayu & Mimba (2013) bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan hasil penelitian yang didapat oleh Rivi & Hasan (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

3. Pengaruh regulasi pemerintah terhadap *Corporate Social Responsibility*

Regulasi pemerintah dapat dipahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan perusahaan, sebab sebagai badan pembuat peraturan pemerintah memiliki peran signifikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya (Diba, 2012).

Pada tahun 2007, DPR telah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya informasi operasional perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan CSR (Pian, 2010).

Regulasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Peran pemerintah menjadi penting karena pemerintahan juga merupakan bagian salah satu komponen stakeholder perusahaan (Basuki & Patrioty, 2009).

Nurfadilah & Sagara (2015) menyatakan bahwa regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Basuki & Patrioty (2009). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pian (2010) yang menyatakan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility*

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain melalui *total asset*, total penjualan, nilai pasar saham, dan

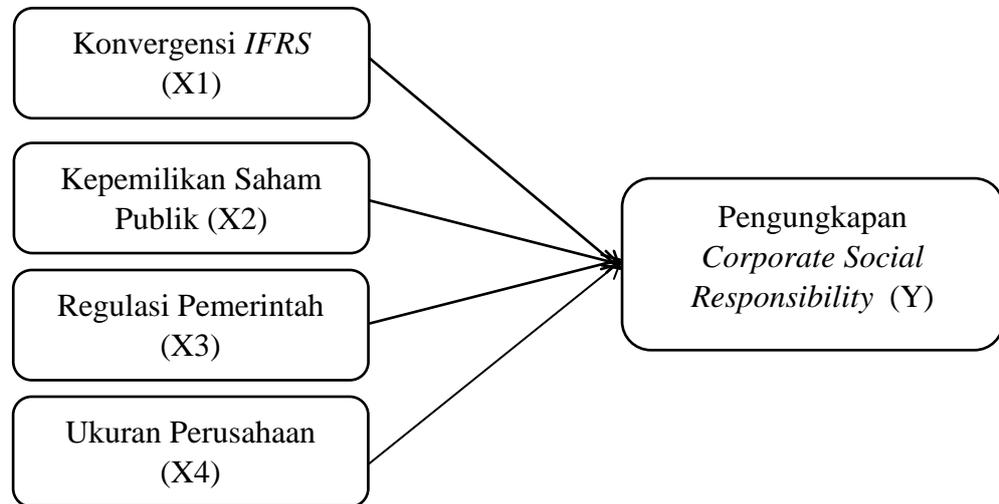
sebagainya. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut (Herry, 2017:3).

Perusahaan besar mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mewujudkan skala ekonomi dalam kegiatan CSR. Perusahaan yang besar juga berurusan dengan pengawasan yang lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu mereka memiliki tanggung jawab yang lebih dalam pengungkapan CSR mereka (Agung, 2015).

Perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas (Badjuri, 2011).

Berbagai penelitian yang berhasil membuktikan hubungan positif antara variabel ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR yaitu dilakukan oleh Nurfadilah & Sagara (2018). Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung (2015). Namun tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR perusahaan.

Dengan demikian kerangka pemikiran di dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dalam bentuk kalimat pertanyaan, belum jawaban yang empirik dengan data atau dapat diuji (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka hipotesis yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

H₂ : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

H₃ : Regulasi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan metode dalam penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 dengan mengakses website dari Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif. Berikut ini kriteria-kriteria pengambilan sampel :

1. Perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.

2. Perusahaan tersebut mempublikasikan secara lengkap laporan tahunan perusahaan periode 2015-2018.
3. Perusahaan tersebut melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan.

Tabel 3.1

Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018	26
Perusahaan tidak mempublikasi secara lengkap laporan tahunan 2015-2018	(7)
Perusahaan tidak melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan	(5)
Jumlah sampel	14
Total sampel yang digunakan 14x4	56

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel 3.2

Daftar Perusahaan

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2.	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3.	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk

4.	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
5.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
6.	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
7.	IIKP	PT. Inti Agri Resources Tbk
8.	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
9.	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
10.	PSDN	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk
11.	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
12.	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
13.	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
14.	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry And Trading

Sumber : Data diolah oleh peneliti

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis secara empiris mengenai Pengaruh Konvergensi IFRS, Kepemilikan Saham Publik, Regulasi Pemerintah dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

a. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007:7).

Dalam penelitian ini tingkat pengungkapan CSR diukur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Saat ini standar GRI versi terbaru adalah versi G4. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Dalam standar GRI-G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Total indikator yang terdapat dalam GRI-G4 mencapai 91 item (Alawiah, 2017).

b. Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu :

1. Kovergensi IFRS

PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS, merupakan PSAK terbaru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan perusahaan berdasarkan PSAK terkini sesuai program konvergensi IFRS. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) efektif per 1 Januari 2020 merupakan wujud nyata DSAK IAI dalam memenuhi komitmen konvergensi IFRS (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Penerapan konvergensi IFRS pada penelitian ini ditentukan ada atau tidaknya dampak signifikan timbul atas penerapan konvergensi IFRS di suatu perusahaan. Konvergensi IFRS diukur dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan perusahaan dalam kategori *DART deloitte accounting research tool other checklists information*.

2. Kepemilikan Saham Publik

Konsentrasi kepemilikan saham publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka diperlukan pendanaan yang diperoleh melalui pendanaan saham masyarakat (publik). Perusahaan dengan kepemilikan saham publik yang tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan dianggap dapat beroperasi dan memberikan deviden yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas (Rahayu & Anisyukurlillah, 2015).

Kepemilikan saham publik dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Besarnya saham publik/masyarakat diukur melalui rasio antara jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap total saham perusahaan di Indonesia (Rahayu & Anisyukurlillah, 2015).

3. Regulasi pemerintah

Belum lama ini Bapepam LK mengeluarkan keputusan No. 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Dibanding aturan yang lama (SK Bapepam No. 38/PM/1996) jumlah informasi yang wajib diungkapkan khususnya yang terkait dengan praktek *Corporate Governance* jauh lebih banyak. Pada tahun 2007, DPR juga telah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya informasi operasional perusahaan yang harus diungkapkan dalam

laporan tahunan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan CSR (Diba, 2012).

Regulasi pemerintah dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Variabel regulasi pemerintah diukur dengan menggunakan *log* natural beban pajak (Nopando & Susanti, 2017).

4. Ukuran Perusahaan

Menurut Wijaya (2012) secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.

Variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan *log* natural *total asset*, tujuannya agar mengurangi perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil sehingga data *total asset* dapat terdistribusi normal (Putri, Zulbahridar, & Kurnia, 2014).

Tabel 3.3

Tabel Definisi Operasional Dan Variabel

No	Variabel	Devinisi	Rumus	Skala
1.	<i>Corporate Social Responsibility</i> (Indika, 2015).	Pengkomunikasian dampak sosial dari kegiatan ekonomi perusahaan.	$CSR D = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{91 \text{ item informasi CSR versi GRI G4}}$	Rasio

No	Variabel	Definisi	Rumus	Skala
2.	Kovergensi IFRS (Gunawan & Hendrawati, 2016).	Upaya untuk menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan keduanya.	Dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan perusahaan dalam kategori DART <i>deloitte accounting research tool other checklists information</i> .	Rasio
3.	Kepemilikan Saham Publik (Rahayu & Anisyukurillah, 2015).	Perusahaan yang kepemilikan saham publiknya tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan deviden yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung mengungkapkan informasi sosial.	$K_{sp} = \frac{\text{jml kepemilikan saham perusahaan}}{\text{total lembar saham perusahaan}} \times 100\%$	Rasio
4.	Regulasi Pemerintah (Basuki & Patrioty,	Regulasi pemerintah dapat dipahami		

No	Variabel	Devinisi	Rumus	Skala
	2009).	sebagai bagian yang tidak dapat di pisahkan dari lingkungan perusahaan.	Regulasi Pemerintah = <i>Log Natural</i> (Beban Pajak)	Rasio
5.	Ukuran Perusahaan (Suripto, 1999)	Pada umumnya perusahaan besar memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, skill karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap.	Ukuran perusahaan = <i>Log Natural</i> (Total <i>Asset</i>)	Rasio

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan

(data sekunder) serta studi pustaka dari berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya.

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) uji statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan 4 cara yaitu : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila nilai residual tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil.

Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan melakukan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pada uji K-S, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data residual berdistribusi

normal. Namun apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka data residual berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas merupakan situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95). Maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- 3) Melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Dalam penelitian ini autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson (DW test)* yang menerapkan titik kritis yaitu batas bawah dan batas atas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya problem autokorelasi pada model regresi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)*. Kriteria pengujian dengan hipotesis tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Uji Autokorelasi

Jika	Keputusan
$0 < d < dl$	Tidak ada Autokorelasi Positif
$dl \leq d \leq du$	Tidak ada Autokorelasi Positif
$4 - dl < d < 4$	Tidak ada Autokorelasi Negatif
$4 - du \leq d \leq 4 - du$	Tidak ada Autokorelasi Negatif
$du < d < 4 - du$	Tidak ada Autokorelasi Positif atau Negatif

Sumber : Ghozali (2016:116).

Keterangan :

d : Nilai DW Hasil Perhitungan

du : Batas Atas

dl : Batas Bawah

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Untuk mengetahui apakah adanya heteroskedastisitas digunakan grafik *scatter plot* yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Adapun model regresi dalam penelitian ini dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ MANDSCR}_{BY} + \beta_2 \text{ KSP} + \beta_3 \text{ REG} + \beta_4 \text{ UP} + e$$

Keterangan :

Y : Pengungkapan CSR

A : Konstanta

β : Koefisien Variabel

MANDSCRBY : Konvergensi IFRS

KSP : Kepemilikan Saham Publik

REG : Regulasi Pemerintah

UP : Ukuran Perusahaan

e : Error (kesalahan pengganggu)

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun kriteria uji parsial adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,025$ maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,025$ maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilainya adalah 0 sampai dengan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan amat terbatas. Jika nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan (Ghozali, 2016).

Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka penelitian ini menggunakan *adjusted R²* untuk mengukur seberapa jauh variabel dependen diterangkan oleh variabel-variabel independen.

F. Metode Analisis Data

Teknik Pengolahan Data yang digunakan adalah *Statistical Package For the Social Science (SPSS)* versi 22.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Perkembangan Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah ada sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek ada sejak jaman kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial VOC.

Pasar modal sudah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal tahun 1997 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Namun pada tahun 1977-1987 perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga tahun

1987 baru mencapai 24 emiten. Pada saat itu masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Akhirnya pada tahun 1987 diadakan deregulasi bursa efek dengan menghadirkan Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Aktivitas perdagangan bursa efek semakin meningkat pada tahun 1988-1990 setelah Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan.

Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) pada tahun 1988 dengan organisasinya yang terdiri dari *broker* dan *dealer*. Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) di tahun yang sama yang memberikan kemudahan perusahaan untuk *go public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Bursa Efek Surabaya (BES) di tahun 1989 mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 12 Juli 1992, yang telah ditetapkan sebagai HUT BEJ, BEJ resmi menjadi perusahaan swasta. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (sebelumnya; Badan Pelaksana Pasar Modal). Satu tahun kemudian pada tanggal 21 Desember 1993, PT Pemingkat Efek Indonesia (PEFINDO) didirikan. Pada tanggal 22 Mei 1995, Bursa Efek Jakarta meluncurkan sistem otomasi

perdagangan yang dilaksanakan dengan sistem komputer JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*).

Pemerintah Indonesia pada tanggal 10 November 1995 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. Bursa Paralel Indonesia kemudian merger dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian satu tahun berikutnya, 6 Agustus 1996, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan. Dilanjutkan dengan pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) di tahun berikutnya, 23 Desember 1997. Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*scripless trading*) pada tahun 2000 mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia, dan di tahun 2002 BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*). Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 30 November 2007 akhirnya digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

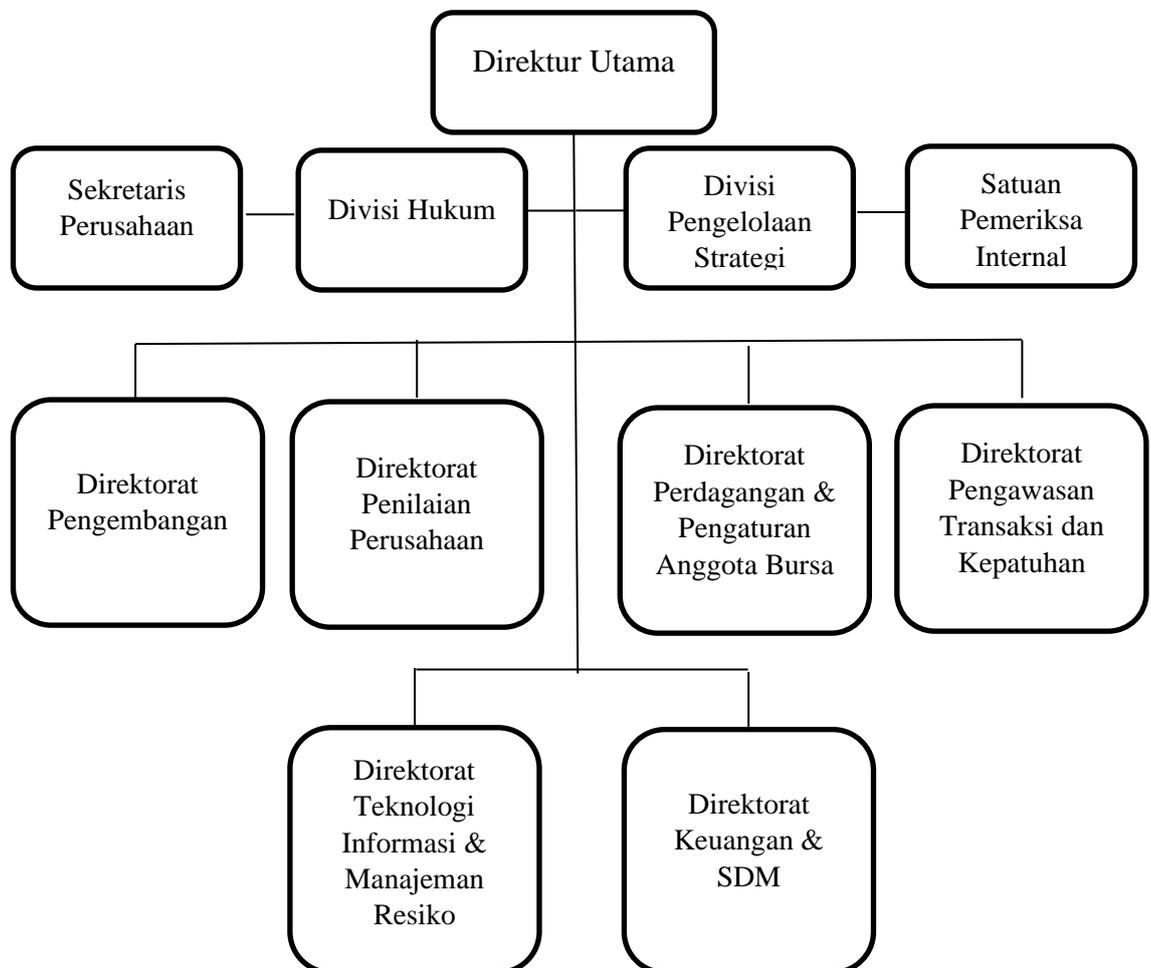
2. Visi Dan Misi Bursa Efek Indonesia

Visi : Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

Misi : Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

3. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

Struktur organisasi merupakan perangkat perusahaan khususnya manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi pada Bursa Efek Indonesia saat ini telah ditinjau dan penyusunannya telah diselaraskan kepada visi dan misi yang akan dicapai dengan melihat proses bisnis dan kemampuan karyawan guna mencapai performa yang optimal. Berikut ini bagan struktur organisasi Bursa Efek Indonesia :



Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi

Sedangkan susunan pengurus Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : John Aristianto Prasetio
- 2) Komisaris : Garibaldi Thohir
- 3) Komisaris : Hendra H. Kustarjo
- 4) Komisaris : Lydia Trivelly Azhar

b. Dewan Direksi

- 1) Direktur Utama : Inarno Djajadi
- 2) Direktur Penilaian Perusahaan : I Gede Nyoman Yetna
- 3) Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa :
Laksono W. Widodo
- 4) Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan : Kristian S.
Manullang
- 5) Direktur Teknologi Informasi & Manajemen Risiko : Fithri Hadi
- 6) Direktur Pengembangan : Hasan Fawzi
- 7) Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Risa S. Rustam.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) data statistik deskriptif ini bertujuan untuk menampilkan informasi-informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut. Deskripsi variabel yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi data berupa rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum yang dilakukan pada variabel *corporate social responsibility*, konvergensi IFRS, kepemilikan saham publik, regulasi pemerintah dan ukuran perusahaan. Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean* dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konvergensi IFRS	56	13.00	43.00	28.6607	6.40533
Kepemilikan Saham	56	1.50	88.31	31.3409	21.48095
Regulasi Pemerintah	56	6.40	12.40	10.5923	1.26536
Ukuran Perusahaan	56	11.47	13.98	12.4880	.65997
Pengukapan CSR	56	.16	.59	.3486	.09941
Valid N (listwise)	56				

Sumber : data diolah SPSS versi 22

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan hasil mengenai analisis statistik sebagai berikut:

1. Konvergensi IFRS

Berdasar hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa konvergensi IFRS memiliki nilai minimum sebesar 13,00 yang terdapat pada perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2018. Konvergensi IFRS memiliki nilai maksimum sebesar 43,00 yang terdapat pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) konvergensi IFRS pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018 adalah sebesar 28,6607. Sedangkan nilai

standar deviasinya sebesar 6,40533. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel konvergensi IFRS dalam penelitian ini baik.

2. Kepemilikan Saham Publik

Berdasar hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa kepemilikan saham publik memiliki nilai minimum sebesar 1,50 yang terdapat pada perusahaan Sekar Bumi Tbk pada tahun 2017. Kepemilikan saham publik memiliki nilai maksimum sebesar 88,31 yang terdapat pada perusahaan Inti Agri Resources Tbk pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan saham publik pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018 adalah sebesar 31,3409. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 21,48095. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel kepemilikan saham publik dalam penelitian ini baik.

3. Regulasi Pemerintah

Berdasar hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa regulasi pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 6,40 yang terdapat pada perusahaan Bumi Teknokultura Unggul Tbk pada tahun 2015. Regulasi pemerintah memiliki nilai maksimum sebesar 12,40 yang terdapat oleh perusahaan Indofood Sukses

Makmur Tbk pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) regulasi pemerintah pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018 adalah sebesar 10,5923. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 1,26536. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel regulasi pemerintah dalam penelitian ini baik.

4. Ukuran Perusahaan

Berdasar hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan, memiliki nilai minimum sebesar 11,47 yang terdapat pada perusahaan Inti Agri Resources Tbk pada tahun 2018. Ukuran perusahaan memiliki nilai maksimum sebesar 13,98 yang terdapat pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) ukuran perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018 adalah sebesar 12,4880. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,65997. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini baik.

5. *Corporate Social Responsibility*

Berdasar hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa *corporate social responsibility*, memiliki nilai minimum sebesar 0,16 yang terdapat pada perusahaan Prasida Aneka Niaga

Tbk pada tahun 2016. *Corporate social responsibility* memiliki nilai maksimum sebesar 0,59 yang terdapat pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) *corporate social responsibility* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018 adalah sebesar 0,3486. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,09941. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel *corporate social responsibility* dalam penelitian ini baik.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji yang dipakai adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Sebagai dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data residual berdistribusi normal, sedangkan nilai signifikan $< 0,05$ berarti data residual berdistribusi tidak normal. Berikut hasil uji normalitas :

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07503606
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.071
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : data diolah SPSS versi 22

Berdasarkan hasil output pengelolaan data uji normalitas dengan menggunakan rumus *kolmogorov-smirnov* sebagai mana tertera pada tabel 4.2, maka dapat diperoleh nilai Asymp sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai *tolerance* serta *Varian Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala multikolinieritas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Konvergensi IFRS	.518	1.929
	Kepemilikan Saham	.874	1.144
	Regulasi Pemerintah	.450	2.224
	Ukuran Perusahaan	.302	3.312

Sumber : data diolah SPSS versi 22

Dari tabel di atas, hasil uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai *tolerance* variabel konvergensi IFRS (X1) sebesar 0,518, kepemilikan saham publik (X2) sebesar 0,874, regulasi pemerintah (X3) sebesar 0,450 dan ukuran perusahaan (X4) sebesar 0,302. Nilai VIF variabel konvergensi IFRS (X1) sebesar 1,929, kepemilikan saham publik (X2) sebesar 1,144, regulasi pemerintah (X3) sebesar 2,224 dan ukuran perusahaan (X4) sebesar 3,312. Semua variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan jumlah nilai VIF kurang dari 10, hal ini dapat disimpulkan bahwa regresi terbebas dari asumsi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

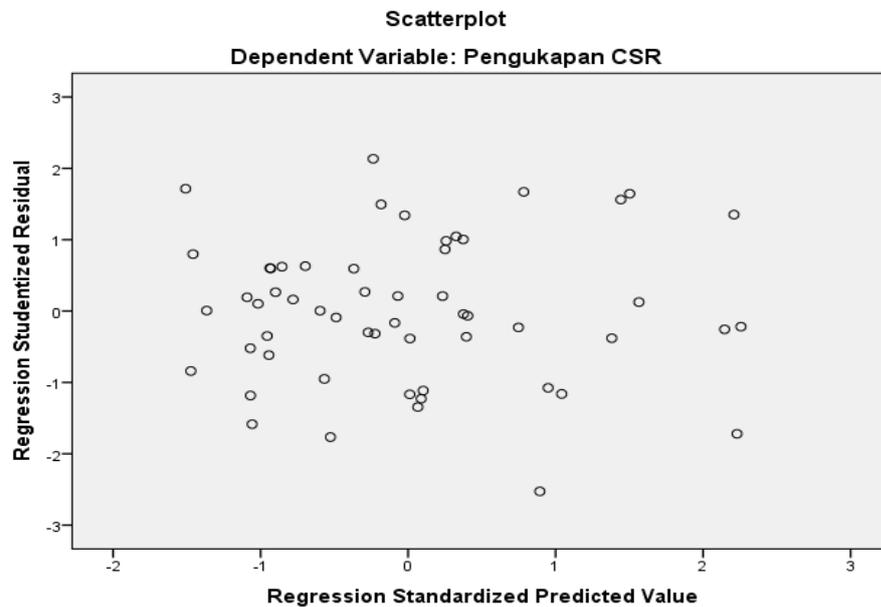
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.568 ^a	.323	.269	.07518	1.760

Sumber : data diolah SPSS versi 22

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,760 sedangkan dari tabel *Durbin-Watson* dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 56, serta k = 4 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dl sebesar 1,4201 dan du sebesar 1,7246. Karena nilai *Durbin – Watson* terletak antara $du < dw < 4-du$ ($1,7246 < 1,760 < 2,2754$). Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

d. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan uji heterokedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:



Sumber : data diolah SPSS versi 22

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID. Berdasarkan hasil gambar *scatterplot* dengan jelas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya asumsi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Linier Berganda

Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-.913	.249		-3.664	.001
	Konvergensi IFRS	.000	.002	-.019	-.130	.897
	Kepemilikan Saham	.040	.001	.010	.091	.928
	Regulasi Pemerintah	-.002	.012	-.025	-.161	.873
	Ukuran Perusahaan	.103	.029	.686	3.565	.001

Sumber : data diolah SPSS versi 22

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda didapat persamaan $Y = -0,913 + 0,000X_1 + 0,040X_2 - 0,002X_3 + 0,103X_4 + e$ diambil suatu kesimpulan bahwa:

- Dari hasil persamaan diperoleh nilai konstanta sebesar $-0,913$, artinya apabila variabel independen konvergensi IFRS, kepemilikan saham publik, regulasi pemerintah dan ukuran perusahaan bernilai 0 maka nilai variabel dependen $-0,913$.
- Koefisien regresi konvergensi IFRS sebesar 0,000 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

- c. Koefisien regresi kepemilikan saham publik sebesar 0,040 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan kepemilikan saham publik akan meningkatkan *corporate social responsibility* sebesar 0,040.
 - d. Koefisien regresi variabel regulasi pemerintah sebesar $- 0,002$ menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan dari variabel regulasi pemerintah akan menurunkan *corporate social responsibility* sebesar 0,002.
 - e. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,103 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan dari variabel ukuran perusahaan akan meningkatkan *corporate social responsibility* sebesar 0,103.
- b. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Signifikansi Parsial

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-.913	.249		-3.664	.001
	Konvergensi IFRS	.000	.002	-.019	-.130	.897
	Kepemilikan Saham	.040	.001	.010	.091	.928
	Regulasi Pemerintah	-.002	.012	-.025	-.161	.873
	Ukuran Perusahaan	.103	.029	.686	3.565	.001

Sumber : data diolah SPSS versi 22

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut :

1. Hasil pengujian terhadap konvergensi IFRS memiliki nilai signifikansi $0,897 > 0,025$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Ini berarti variabel konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Dengan demikian H_1 yang menyatakan bahwa konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility* ditolak.
2. Hasil pengujian terhadap kepemilikan saham publik memiliki nilai signifikansi $0,928 > 0,025$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak. Ini berarti variabel kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Dengan demikian H_2 yang menyatakan bahwa

kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility* ditolak.

3. Hasil pengujian terhadap regulasi pemerintah memiliki nilai signifikansi $0,873 > 0,025$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Ini berarti variabel regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Dengan demikian H_3 yang menyatakan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility* ditolak.
4. Hasil pengujian terhadap ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,025$, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. Nilai B ukuran perusahaan sebesar 0,103 menunjukkan pengaruh positif. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif variabel ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility*. Dengan demikian H_4 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* diterima.

c. Koefisien Determinasi

Berdasarkan analisis koefisien determinasi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.568 ^a	.323	.269	.07518

Sumber : data diolah SPSS versi 22

Dari hasil perhitungan pada tabel, dapat diketahui nilai Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,269. Nilai tersebut mengandung arti bahwa total variasi *corporate social responsibility* yang disebabkan oleh konvergensi IFRS, kepemilikan saham publik, regulasi pemerintah dan ukuran perusahaan secara bersama-sama adalah 26,9% dan sisanya sebesar 73,1% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pertumbuhan penjualan dan *capital intensity*.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah hasil pembahasan pada penelitian ini:

1. Pengaruh konvergensi IFRS terhadap *corporate social responsibility*

Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan koefisien regresi untuk konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis di mana nilai signifikansi sebesar 0,897 pada taraf signifikansi 2,5% berarti $0,897 > 0,025$. Maka

dapat disimpulkan bahwa konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* karena pengungkapan sukarela masih rendah meskipun telah dilakukan peningkatan standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan dapat beranggapan dengan meningkatkan *mandatory disclosure* mampu menggantikan *voluntary disclosure*, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan adanya konvergensi IFRS tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan yang memperhatikan *mandatory disclosure* juga memperhatikan *voluntary disclosure* berupa pengungkapan *corporate social responsibility* (Ayem & Rohana, 2019). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Ledoux & Cormier (2011) yang menemukan bahwa dengan peningkatan standar akuntansi melalui konvergensi IFRS maka *voluntary disclosure* semakin rendah.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Smith, *et al.* (2014) yang menemukan bahwa dengan adanya konvergensi IFRS menunjukkan peningkatan *corporate social disclosure* yang dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan. Dalam keadaan tertentu perusahaan ingin meningkatkan kredibilitas *mandatory disclosure* dengan menyediakan kolaborasi *voluntary disclosure*, dalam hal ini *mandatory disclosure* dan *voluntary*

disclosure akan saling melengkapi. Dengan adanya keseimbangan pengungkapan tersebut maka investor akan memberikan penilaian yang positif karena adanya transparansi kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (Ayem & Rohana, 2019).

2. Pengaruh kepemilikan saham publik terhadap *corporate social responsibility*

Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan koefisien regresi untuk kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis di mana nilai signifikansi sebesar 0,928 pada taraf signifikansi 2,5% berarti $0,928 > 0,025$. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* karena semakin banyak jumlah kepemilikan saham publik, maka semakin rendah tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Secara historis struktur kepemilikan saham di Indonesia masih terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga, sehingga manajer hanyalah sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan untuk menekan manajemen (Indraswari & Astika,

2015). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Rivi & Hasan (2011) dan Putra & Prastiwi (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handriani (2011) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sriayu & Mimba (2013) bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada perusahaan yang sahamnya tidak dikuasai oleh publik.

3. Pengaruh regulasi pemerintah terhadap *corporate social responsibility*

Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan koefisien regresi untuk regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis di mana nilai signifikansi sebesar 0,873 pada taraf signifikansi 2,5% berarti $0,873 > 0,025$. Maka dapat disimpulkan bahwa regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate*

social responsibility. Dalam hal ini perusahaan yang menerapkan peraturan pemerintah dengan baik tidak mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* karena peraturan pemerintah belum tentu sesuai dengan kondisi dan kebijakan perusahaan (Nopando & Susanti, 2017).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang didapat dari Nurfadilah & Sagara (2015) yang menyatakan bahwa regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Basuki & Patrioty (2009).

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pian (2010) menyatakan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Adanya suatu regulasi yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan maka akan memperluas tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini terjadi karena peraturan bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga pelaksanaan suatu peraturan oleh perusahaan menjadi motif tersendiri yang menunjukkan perusahaan tersebut telah menaati peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan mereka.

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility*

Dari perhitungan uji t dengan menggunakan SPSS 22 menunjukkan koefisien regresi untuk ukuran perusahaan berpengaruh

positif terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari nilai perhitungan uji hipotesis di mana nilai signifikansi sebesar 0,001 pada taraf signifikansi 2,5% berarti $0,001 < 0,025$. Nilai B sebesar 0,103 menunjukkan pengaruh positif. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah *asset* (kekayaan) yang tinggi akan mengungkapkan *corporate social responsibility* lebih luas untuk mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku yang tidak pantas diterima perusahaan. Perusahaan yang memberikan dampak lebih besar terhadap masyarakat, kemungkinan mempunyai lebih banyak pemegang saham yang boleh jadi terkait dengan program sosial perusahaan dan laporan keuangan tahunan akan dijadikan sebagai alat yang efisien untuk menyebarkan informasi, sehingga perusahaan yang besar lebih berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (Putra & Prastiwi, 2012).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Nurfadilah & Sagara (2018). Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Uji T dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Karena pengungkapan sukarela masih rendah meskipun telah dilakukan peningkatan standar akuntansi yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil Uji T dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Karena semakin banyak jumlah kepemilikan saham publik, maka semakin rendah tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.
3. Berdasarkan hasil Uji T dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Karena peraturan pemerintah belum tentu sesuai dengan kondisi dan kebijakan perusahaan.
4. Berdasarkan hasil Uji T dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Ukuran perusahaan yang besar

dengan jumlah asset (kekayaan) yang tinggi akan mengungkapkan *corporate social responsibility* lebih luas untuk mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku yang tidak pantas diterima perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan lebih meningkatkan konvergensi IFRS agar pengungkapan CSR dapat lebih optimal setiap tahunnya. Dengan adanya konvergensi IFRS dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan, sehingga memberikan perubahan terhadap kualitas informasi perusahaan dalam pengungkapan CSR.
2. Perusahaan diharapkan meningkatkan porsi kepemilikan saham yang dimiliki publik karena semakin besar kepemilikan saham publik, maka semakin tinggi juga tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat.
3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan kebijakan perusahaan. Karena perusahaan yang menerapkan peraturan pemerintah dengan baik dapat meningkatkan pengungkapan CSR.
4. Perusahaan diharapkan meningkatkan *total asset* maupun total penjualan bersih, karena semakin besar *total asset* maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Sehingga akan

mengungkapkan informasi lebih banyak dan lebih luas dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan.

5. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti sampel penelitian dengan jenis perusahaan yang lainnya seperti perusahaan perbankan dan perusahaan property. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan penjualan dan *capital intensity*.

C. Keterbatasan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility* dari penelitian ini hanya terdiri dari empat variabel independen yaitu konvergensi IFRS, kepemilikan saham publik, regulasi pemerintah dan ukuran perusahaan. Sedangkan masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *corporate social responsibility* seperti pertumbuhan penjualan, *capital intensity*, *leverage* dan lain sebagainya.
2. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan 14 sampel perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 4 tahun yaitu tahun 2015-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, H. (2018). Tanggung Jawab Sosial Industri Rokok. Retrieved March 28, 2020, from [www.detik.com](https://m.detik.com/news/kolom/d-3803959/tanggung-jawab-sosial-industri-rokok) website: <https://m.detik.com/news/kolom/d-3803959/tanggung-jawab-sosial-industri-rokok>.
- Agung, A. K. B. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Cakupan Operasional Perusahaan, Dan Sertifikasi ISO 14001 Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2013). *Diiponegoro Journal Of Accounting*, 4(3), 22–32.
- Aini, A. K. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ45 Bursa Saham Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 1(2), 1–14.
- Alawiah, S. Z. (2017). Pengaruh Pengungkapan CSR Dan Informasi Keuangan Terhadap Abnormal Return (Doctoral Dissertation). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Ayem, S., & Rohana, F. (2019). Pengaruh Konvergensi IFRS Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 85–97.
- Badjuri, A. (2011). Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur Dan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 38–54.
- Banjarnahor, H. (2017). Dampak Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur Listing di BEI. 62–76.
- Basuki, & Patrioty, C. N. (2009). Pengaruh Regulasi Pemerintah, Tekanan Masyarakat, Tekanan Organisasi Lingkungan, Dan Tekanan Media Massa Terhadap Corporate Social Disclosure. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 15(110), 23–39.
- Bursa Efek Indonesia. (2017). *Panduan Go Publik Indonesia Stock Exchange IDX*. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.

- Diba, F. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Laporan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Laporan Tahunan (Doctoral Dissertation) Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, B., & Hendrawati, E. R. (2016). Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1, 71–83.
- Handriani, E. (2011). Pengembangan Kualitas Pendidikan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Inkoma*, 22(1), 83–95.
- Herry. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Katalog 2019*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indika, M. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Fordema*, 12(2007), 103–120.
- Indraswari, G. A., & Astika, I. B. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*. Vol. 2, No. 1, Hal : 289-302.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R., Syamsul, M., Siregar, S., & Wahyuni, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lamia, F., Zirman., & Anisma, Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Porsi Kepemilikan Saham Publik Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Food & Beverages Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 1–15.

- Ledoux, M., & Cormier, D. (2011). Market Assessment of Intangibles and Voluntary Disclosure about Innovation : The Incidence of IFRS. *Review of Accounting and Finance*, 0–38.
- Martani, D., Veronica, S., Farahmnita, A., Wardhani, R., & Tanudjaja, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasir, A., Kurnia, P., & Hakri, T. D. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Profitabilitas, Ukuran, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 21, 1–14.
- Nopando, C. C., & Susanti, D. A. (2017). Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Accounting Global Journal*, 1(1).
- Nurfadilah, W., & Sagara, Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 130.
- Pian, A. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Laporan Tahunan Di Indonesia (Doctoral Dissertation). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Putra, C. B. P. & Prastiwi, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 1.
- Putri, R. K., Zulfahridar, & Kurnia, P. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dan Basis Kepemilikan Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2012-2014. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.
- Rahayu, P., & Anisyukurlillah, I. (2015). Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas Dan Media Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–9.

- Rivi, H. W., & Hasan, S. S. (2011). Pengaruh Sisi Internal Dan Sisi Eksternal Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 14(4), 180–190.
- Rudito, B., & Famiola, M. (2019). *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Situmorang, L. S. (2017). Pengaruh Regulasi Pemerintah, Tipe Industri Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Doctoral Dissertation). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Smith, Gouldman, & Tondkar. (2014). Does The Adoption Of IFRS Affect Corporate Social Disclosure In Annual Report? *Advances in Accounting*, 30(2), 402–412.
- Sriayu, G., & Mimba, N. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(2), 326–344.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2017). *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management dalam CSR*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Wijaya, M. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 291–299.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MASUK DALAM
SEMPEL PENELITIAN

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2.	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3.	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk
4.	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
5.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
6.	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
7.	IIKP	PT. Inti Agri Resources Tbk
8.	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
9.	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
10.	PSDN	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk
11.	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
12.	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
13.	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
14.	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry And Trading

Lampiran 2

DATA VARIABEL KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN SAHAM
PUBLIK, REGULASI PEMERINTAH, UKURAN PERUSAHAAN DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

No	Sektor BEI	Tahun	IFRS	Kep. Saham	Reg. pem	Uk. Peru	CSR
			Nominal	%	Decimal	Decimal	Decimal
1	ADES	2015	31	8,06	10,05	11,82	0,24
		2016	22	8,48	9,75	11,86	0,26
		2017	28	8,48	10,11	11,92	0,31
		2018	28	8,48	10,23	11,95	0,34
2	AISA	2015	26	36,98	11,1	12,96	0,38
		2016	20	32,76	11,25	12,97	0,52
		2017	17	33,43	10,38	12,3	0,49
		2018	13	57,5	10,58	12,26	0,31
3	BTEK	2015	26	76,34	6,4	11,69	0,29
		2016	29	26,53	7,96	12,69	0,35
		2017	32	45,78	9,24	12,72	0,37
		2018	36	52,5	9,23	12,71	0,37
4	BUDI	2015	25	46,94	10,49	12,51	0,25
		2016	25	46,6	10,15	12,47	0,32
		2017	25	46,6	10,19	12,47	0,26
		2018	25	46,6	10,33	12,53	0,27
5	CEKA	2015	31	12,98	10,55	12,17	0,18
		2016	33	12,81	10,56	12,15	0,24
		2017	36	12,98	10,55	12,14	0,31
		2018	34	12,98	10,49	12,07	0,35
6	ICBP	2015	38	19,47	12,04	13,42	0,41
		2016	38	19,47	12,13	13,46	0,56
		2017	38	19,47	12,22	13,5	0,57
		2018	38	19,47	12,25	13,54	0,46
7	IIKP	2015	25	48,43	9,56	11,52	0,19
		2016	21	88,31	9,66	11,56	0,26
		2017	21	80,9	9,41	11,5	0,31
		2018	23	83,69	9,26	11,47	0,37
8	INDF	2015	43	49,91	12,24	13,96	0,37
		2016	43	49,91	12,4	13,91	0,47
		2017	43	49,91	12,4	13,95	0,59
		2018	43	49,91	12,4	13,98	0,48
9	MLBI	2015	28	18,22	11,25	12,32	0,35

		2016	25	18,22	11,53	12,36	0,31
		2017	29	18,22	11,66	12,4	0,45
		2018	25	18,22	11,65	12,46	0,36
10	MYOR	2015	27	67,07	11,6	13,05	0,22
		2016	27	15,77	11,66	13,11	0,33
		2017	27	15,71	11,75	13,17	0,33
		2018	27	16,76	7,53	11,84	0,33
11	PSDN	2015	21	8,99	9,98	11,79	0,19
		2016	26	8,99	10,42	11,82	0,16
		2017	26	16,76	10,33	11,84	0,29
		2018	26	16,76	7,53	11,84	0,33
12	ROTI	2015	25	29,24	11,03	12,43	0,33
		2016	25	30,62	10,95	12,47	0,45
		2017	28	2,38	10,71	12,66	0,43
		2018	28	25,6	10,78	12,64	0,38
13	SKBM	2015	25	16,41	10,13	11,88	0,24
		2016	29	15,3	10,39	12	0,31
		2017	31	1,5	11,08	12,21	0,31
		2018	31	39,97	10,15	12,25	0,37
14	ULTJ	2015	27	35,52	11,25	12,55	0,26
		2016	30	51,41	11,35	12,66	0,44
		2017	28	29,19	11,5	12,71	0,45
		2018	28	25,6	11,4	12,74	0,45

Lampiran 3

DART *Deloitte Accounting Research Tool*

<p>GAAP Checklist Q1 2016 Quarterly Updates</p>	<p><u>ASU 2016-01, Recognition and Measurement of Financial Assets and Financial Liabilities</u></p> <p><u>ASU 2016-02, Leases (Topic 842)</u></p> <p><u>ASU 2016-03, Intangible — Goodwill and Other (Topic 350), Business Combinations (Topic 805), Consolidation (Topic 810), Derivatives and Hedging (Topic 815)</u></p> <p><u>ASU 2016-04, Liabilities — Extinguishments of Liabilities</u></p> <p><u>ASU 2016-05, Derivatives and Hedging (Topic 815)</u></p> <p><u>ASU 2016-06, Contingent Put and Call Options in Debt Instruments</u></p> <p><u>ASU 2016-07, Simplifying the Transition to the Equity Method of Accounting</u></p> <p><u>ASU 2016-09, Improvements to Employee Share-Based Payment Accounting</u></p>
<p>GAAP Checklist Q2 2016 Quarterly Updates</p>	<p><u>ASU 2016-10, Identifying Performance Obligations and Licensing</u></p> <p><u>ASU 2016-12, Narrow-Scope Improvements and Practical Expedients</u></p>
<p>GAAP Checklist Q3 2016 Quarterly Updates</p>	<p><u>ASU 2016-14, Presentation of Financial Statements of Not-for-Profit Entities</u></p> <p><u>ASU 2016-15, Statement of Cash Flows</u></p>
<p>GAAP Checklist Q4 2016 Quarterly Updates</p>	<p><u>ASU 2016-16, Intra-Entity Transfers of Assets Other Than Inventory</u></p> <p><u>ASU 2016-17, Interests Held through Related Parties That Are under Common Control</u></p> <p><u>ASU 2016-18, Restricted Cash</u></p> <p><u>ASU 2016-19, Technical Corrections and</u></p>

	<p><u>Improvements</u></p> <p><u>ASU 2016-20, Technical Corrections and Improvements to Topic 606, Revenue from Contracts with Customers</u></p>
GAAP Checklist Q1 2017 Quarterly Updates	<p><u>ASU 2017-01, Clarifying the Definition of a Business</u></p> <p><u>ASU 2017-02, Clarifying When a Not-for-Profit Entity That is a General Partner or a Limited Partner Should Consolidate a For-Profit Limited Partnership or Similar Entity</u></p> <p><u>ASU 2017-03, Accounting for Changes and Error Corrections (Topic 250) and Investments – Equity Method and Joint Ventures (Topic 323)</u></p> <p><u>ASU 2017-04, Simplifying the Test for Goodwill Impairment</u></p> <p><u>ASU 2017-05, Other Income — Gains and Losses from the De-recognition of Nonfinancial Assets (Subtopic 610-20)</u></p> <p><u>ASU 2017-06, Employee Benefit Master Trust Reporting</u></p> <p><u>ASU 2017-07, Improving the Presentation of Net Periodic Pension Cost and Net Periodic Postretirement Benefit Cost</u></p> <p><u>ASU 2017-08, Premium Amortization on Purchased Callable Debt Securities</u></p>
GAAP Checklist Q2 2017 Quarterly Updates	<p><u>ASU 2017-09, Scope of Modification Accounting</u></p> <p><u>ASU 2017-10, Determining the Customer of the Operation Services</u></p>
GAAP Checklist Q3 2017 Quarterly Updates	<p><u>ASU 2017-11, Earnings Per Share (Topic 260); Distinguishing Liabilities from Equity (Topic 480); Derivatives and Hedging (Topic 815): (Part I) Accounting for Certain Financial Instruments with Down Round Features, (Part II) Replacement of the</u></p>

	<p><u><i>Indefinite Deferral for Mandatorily Redeemable Financial Instruments of Certain Nonpublic Entities and Certain Mandatorily Redeemable Noncontrolling Interests with a Scope Exception</i></u></p> <p><u><i>ASU 2017-12, Derivatives and Hedging (Topic 815): Targeted Improvements to Accounting for Hedging Activities</i></u></p>
GAAP Checklist Q4 2017 Quarterly Updates	<p><u><i>ASU 2017-14, Income Statement — Reporting Comprehensive Income (Topic 220), Revenue Recognition (Topic 605), and Revenue from Contracts with Customers (Topic 606)</i></u></p> <p><u><i>ASU 2017-15, Codification Improvements to Topic 995, U.S. Steamship Entities: Elimination of Topic 995</i></u></p>
GAAP Checklist Q1 2018 Quarterly Updates	<p><u><i>ASU 2018-01, Leases (Topic 842): Land Easement Practical Expedient for Transition to Topic 842</i></u></p> <p><u><i>ASU 2018-02, Income Statement — Reporting Comprehensive Income (Topic 220): Reclassification of Certain Tax Effects from Accumulated Other Comprehensive Income</i></u></p> <p><u><i>ASU 2018-03, Technical Corrections and Improvements to Financial Instruments — Overall (Subtopic 825-10): Recognition and Measurement of Financial Assets and Financial Liabilities</i></u></p> <p><u><i>ASU 2018-04, Investments — Debt Securities (Topic 320) and Regulated Operations (Topic 980): Amendments to SEC Paragraphs Pursuant to SEC Staff Accounting Bulletin No. 117 and SEC Release No. 33-9273 (SEC Update)</i></u></p> <p><u><i>ASU 2018-05, Income Taxes (Topic 740): Amendments to SEC Paragraphs Pursuant to SEC Staff Accounting Bulletin No. 118 (SEC Update)</i></u></p>
GAAP Checklist Q2 2018 Quarterly Updates	<p><u><i>ASU 2018-06, Codification Improvements to Topic 942, Financial Services — Depository and Lending</i></u></p> <p><u><i>ASU 2018-07, Compensation — Stock Compensation (Topic 718): Improvements to Nonemployee Share-</i></u></p>

	<p><u>Based Payment Accounting</u></p> <p><u>ASU 2018-08, Not-for-Profit Entities (Topic 958): Clarifying the Scope and the Accounting Guidance for Contributions Received and Contributions Made</u></p>
<p>GAAP Checklist Q3 2018 Quarterly Updates</p>	<p><u>ASU 2018-09, Codification Improvements</u></p> <p><u>ASU 2018-10, Codification Improvements to Topic 842, Leases</u></p> <p><u>ASU 2018-11, Leases (Topic 842): Targeted Improvements</u></p> <p><u>ASU 2018-12, Financial Services — Insurance (Topic 944): Targeted Improvements to the Accounting for Long-Duration Contracts</u></p> <p><u>ASU 2018-13, Fair Value Measurement (Topic 820): Disclosure Framework — Changes to the Disclosure Requirements for Fair Value Measurement</u></p> <p><u>ASU 2018-14, Compensation — Retirement Benefits — Defined Benefit Plans—General (Subtopic 715-20): Disclosure Framework — Changes to the Disclosure Requirements for Defined Benefit Plans</u></p> <p><u>ASU 2018-15, Intangibles — Goodwill and Other — Internal-Use Software (Subtopic 350-40): Customer’s Accounting for Implementation Costs Incurred in a Cloud Computing Arrangement That Is a Service Contract (a consensus of the FASB Emerging Issues Task Force)</u></p>
<p>GAAP Checklist Q4 2018 Quarterly Updates</p>	<p><u>ASU 2018-16, Derivatives and Hedging (Topic 815) — Inclusion of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Overnight Index Swap (OIS) Rate as a Benchmark Interest Rate for Hedge Accounting Purposes.</u></p> <p><u>ASU 2018-17, Consolidation (Topic 810) — Targeted Improvements to Related Party Guidance for Variable Interest Entities.</u></p> <p><u>ASU 2018-18, Collaborative Arrangements (Topic 808) — Clarifying the Interaction Between Topic 808 and Topic 606.</u></p>

	<p><u>ASU 2018-19, Codification Improvements to Topic 326, Financial Instruments — Credit Losses.</u></p> <p><u>ASU 2018 -20, Leases (Topic 842) — Narrow-Scope Improvement for Lessors.</u></p>
GAAP Checklist Q1 2019 Quarterly Updates	<p><u>ASU 2019-01, Leases (Topic 842) — Codification Improvements.</u></p> <p><u>ASU 2019-02, Entertainment — Films — Other Assets — Film Costs (Subtopic 926-20) and Entertainment — Broadcasters — Intangibles — Goodwill and Other (Subtopic 920-350) — Improvements to Accounting for Costs of Films and License Agreements for Program Materials.</u></p> <p><u>ASU 2019-03, Not-for-Profit Entities (Topic 958) — Updating the Definition of Collections.</u></p>
GAAP Checklist Q2 2019 Quarterly Updates	<p><u>ASU 2019-04, Codification Improvements to Topic 326, Financial Instruments — Credit Losses, Topic 815, Derivatives and Hedging, and Topic 825, Financial Instruments.</u></p> <p><u>ASU 2019-05, Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326) — Targeted Transition Relief.</u></p> <p><u>ASU 2019-06, Intangibles — Goodwill and Other (Topic 350), Business Combinations (Topic 805), and Not-for-Profit Entities (Topic 958) — Extending the Private Company Accounting Alternatives on Goodwill and Certain Identifiable Intangible Assets to Not-for-Profit Entities.</u></p>
GAAP Checklist Q3 2019 Quarterly Updates	<p><u>ASU 2019-07, Codification Updates to SEC Sections — Amendments to SEC Paragraphs Pursuant to SEC Final Rule Releases No. 33-10532, Disclosure Update and Simplification, and Nos. 33-10231 and 33-10442, Investment Company Reporting Modernization, and Miscellaneous Updates.</u></p>
GAAP Checklist Q4 2019 Quarterly Updates	<p><u>2019-08, Compensation — Stock Compensation (Topic 718) and Revenue from Contracts with Customers (Topic 606): Codification Improvements — Share-Based Consideration Payable to a Customer</u></p>

	<p><u>2019-09, Financial Services — Insurance (Topic 944): Effective Date</u></p> <p><u>2019-10, Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326), Derivatives and Hedging (Topic 815), and Leases (Topic 842): Effective Dates</u></p> <p><u>2019-11, Codification Improvements to Topic 326, Financial Instruments — Credit Losses</u></p> <p><u>2019-12, Income Taxes (Topic 740) — Simplifying the Accounting for Income Taxes</u></p>
<p>GAAP Checklist Q1 2020 Quarterly Updates</p>	<p><u>2020-01 — Investments — Equity Securities (Topic 321), Investments — Equity Method and Joint Ventures (Topic 323), and Derivatives and Hedging (Topic 815) — Clarifying the Interactions between Topic 321, Topic 323, and Topic 815 (a Consensus of the Emerging Issues Task Force)</u></p> <p><u>2020-02 — Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326) and Leases (Topic 842) — Amendments to SEC Paragraphs Pursuant to SEC Staff Accounting Bulletin No. 119 and Update to SEC Section on Effective Date Related to Accounting Standards Update No. 2016-02, Leases (Topic 842)</u></p> <p><u>2020-03 — Codification Improvements to Financial Instruments</u></p> <p><u>2020-04 — Reference Rate Reform (Topic 848): Facilitation of the Effects of Reference Rate Reform on Financial Reporting</u></p>
<p>GAAP Checklist Q2 2020 Quarterly Updates</p>	<p><u>2020-05 — Revenue from Contracts with Customers (Topic 606) and Leases (Topic 842): Effective Dates for Certain Entities</u></p>

Lampiran 4

HASIL ANALISIS

1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konvergensi IFRS	56	13.00	43.00	28.6607	6.40533
Kepemilikan Saham	56	1.50	88.31	31.3409	21.48095
Regulasi Pemerintah	56	6.40	12.40	10.5923	1.26536
Ukuran Perusahaan	56	11.47	13.98	12.4880	.65997
Pengukapan CSR	56	.16	.59	.3486	.09941
Valid N (listwise)	56				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07503606
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.071
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

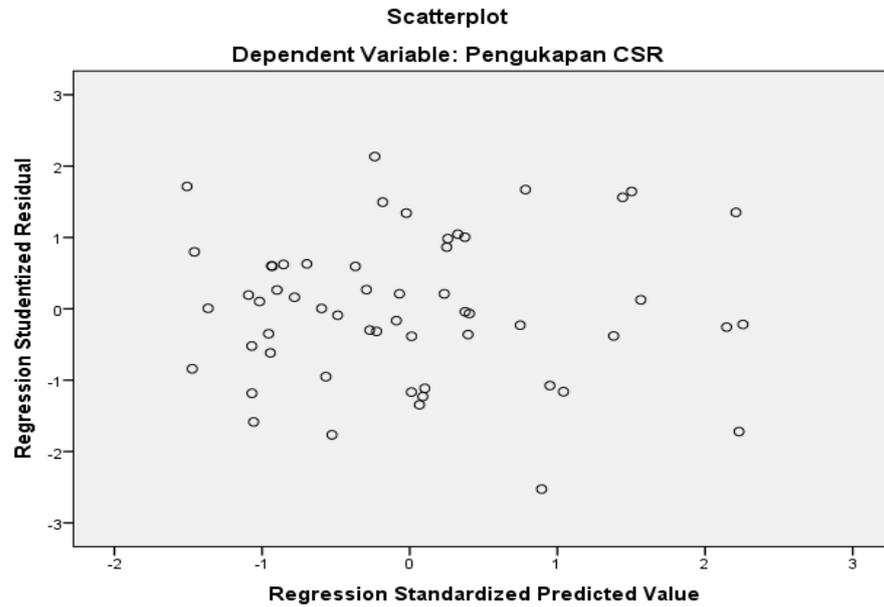
b. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Konvergensi IFRS	.518	1.929
Kepemilikan Saham	.874	1.144
Regulasi Pemerintah	.450	2.224
Ukuran Perusahaan	.302	3.312

c. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.568 ^a	.323	.269	.07518	1.760

d. Uji heteroskedastisitas



1. Uji Hipotesis

a. Analisis linier berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.913	.249		-3.664	.001
	Konvergensi IFRS	.000	.002	-.019	-.130	.897
	Kepemilikan Saham	.040	.001	.010	.091	.928
	Regulasi					
	Pemerintah	-.002	.012	-.025	-.161	.873
	Ukuran Perusahaan	.103	.029	.686	3.565	.001

b. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.913	.249		-3.664	.001
	Konvergensi IFRS	.000	.002	-.019	-.130	.897
	Kepemilikan Saham	.040	.001	.010	.091	.928
	Regulasi					
	Pemerintah	-.002	.012	-.025	-.161	.873
	Ukuran Perusahaan	.103	.029	.686	3.565	.001

c. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.568 ^a	.323	.269	.07518